

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bencana Gempa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan asas hukum, perundang-undangan ditinjau dari undang-undang yang mengaturnya, dengan jalan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Muhir, terdakwa dipidana penjara 4 tahun, semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada pada M. Muhir adalah Hukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang, ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1, dimana ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional. Menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam pemidanaan tersangka korupsi, dapat membantu meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian negara.

**Kata kunci:** pemberatan hukuman, dana bantuan bencana gempa.

## *Abstract*

### ***ENFORCEMENT OF EARTHQUAKE DISASTER FUND CORRUPTION IS LINKED TO LAW NO. 20 OF 2001 ON CHANGES TO LAW NO. 31 OF 1999 ON ERADICATING CORRUPTION CRIMES***

*This writing is titled Law Enforcement Against Earthquake Disaster Fund Corruption Actors Linked To Law No. 20/2001 on Changes to Law No. 31/1999 on Eradicating Corruption Crimes. This research aims to examine how law enforcement against the perpetrators of earthquake disaster fund corruption and in addition this research also aims to find out what factors prevent the death penalty from applying to the perpetrators of earthquake disaster fund corruption.*

*This writing uses research methods in the form of normative juridical approaches with descriptive analysis by examining research objects based on legal principles, legislation is reviewed from the laws governing it, by studying the rules of law according to literature studies sourced from various literature materials.*

*The result of this study is that the panel of judges is too light in imposing a criminal against defendant M. Muhir, the defendant is sentenced to 4 years in prison, should the panel of judges impose a verdict on a sanction on M. Muhir is the Death Penalty, because in this case the defendant has been convicted of corruption of disaster relief money or calamity as stipulated in Law No. 20 of 2001 on changes to Law No. 31 of 1999 On the Eradication of Corruption Crimes. In the Law, the threat of the death penalty is directed at the perpetrators of tipikor or corruption crimes that violate article 2 paragraph 1, where paragraph 2 of the article stipulates the threat of the death penalty is only dropped if the state is in danger, there is a national natural disaster. Implementing article 2 paragraphs 1 and 2 of Law No. 20 of 2001 on changes to Law No. 31 of 1999 on eradicating corruption crimes as a reference in the funding of corruption suspects, can help minimize corruption cases in Indonesia and also improve the country's economy.*

***Keywords:*** *penalty reinforcement, earthquake disaster relief fund.*